## KEPUTUSAN

180/1.05.14N/19/79.

# MENTERI PENDIDIKAN DAN KEDUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

030/0/1979

.

No.:

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

tentang

### MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 003f/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Yang Disempurnakan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0374/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

# Mengingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - 1. No. 73/M tahun 1972;
  - 2. No. 11 tahun 1974;
  - 3. No. 44 tahun 1974;
  - 4. No. 45 tahun 1974;
  - 5. No. 12 tahun 1977;
  - No. 59/M tahun 1973;
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - 1. tanggal 17 Januari 1975 No. 008f/U/1975;
    - 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
    - 3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976.

Mengingat pula Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Pebruari 1979, No. B-188/I/MENPAN/2/79.

# MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976.

### Menetapkan

Keempat

Kelima

Keenam

T.

Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.

Kedua: Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.

Ketiga: Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Fendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 17 Pebruari 1979.

MEMTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

( T. Umar Ali )